



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kearsipan diperlukan sistem yang memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang mampu merespon tuntutan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk pengelolaan arsip dinamis dan memudahkan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu adanya sistem klasifikasi keamanan atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sistem klasifikasi keamanan dan hak untuk mengakses arsip dinamis di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
4. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip dinamis



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.

5. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK adalah acuan bagi pejabat dan pegawai terkait dalam menyediakan layanan informasi Arsip kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara internal maupun eksternal dengan prinsip cepat, tepat, terotorisasi dan aman.
6. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.
7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga pemerintahan.
8. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
11. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

12. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
13. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari lingkungan LPSK.
14. Pengguna Eksternal adalah orang yang menggunakan Arsip yang berasal dari luar LPSK.
15. Publik adalah warganegara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
16. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
18. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 2

- (1) Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis dibedakan berdasarkan tingkat klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Biasa/Terbuka;
 - b. Terbatas; dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- c. Rahasia.
- (2) Tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
 - a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya; dan
 - b. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
- (3) Klasifikasi Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja LPSK.
- (4) Klasifikasi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan LPSK.
- (5) Klasifikasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga dapat mengganggu kinerja LPSK seperti Arsip yang tercipta dari proses pemberian layanan perlindungan saksi dan korban.

Pasal 3

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Sarana perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional, berupa rak Arsip, brankas, atau lemari besi;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru, berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip yang bertugas mengelola Arsip merupakan pegawai yang profesional baik dalam substansi keArsipan serta memiliki dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip di *Central File*, Pusat Arsip dan Unit Kerja LPSK.
- (2) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagai pengelola Arsip inaktif berperan dalam pengamanan Arsip di Pusat Arsip dalam menetapkan hak akses Arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola Arsip di *central file* dan/atau unit kerja masing-masing.

BAB III

PENGAMANAN FISIK DAN INFORMASI ARSIP



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

Pasal 6

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan dapat berupa:
 - a. pemasangan kamera pengawas, jika diperlukan;
 - b. kunci pengamanan ruangan; dan
 - c. media simpan Arsip.
- (2) Media simpan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. rak besi untuk Arsip Biasa/Terbuka;
 - b. rak Arsip untuk Arsip Terbatas; dan
 - c. lemari besi atau brankas untuk Arsip Rahasia.

Pasal 7

Pengamanan informasi Arsip Dinamis di lingkungan LPSK meliputi:

- a. penciptaan daftar Arsip Terbatas; dan
- b. daftar Arsip Rahasia.

Pasal 8

Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di pusat Arsip dan di *central file*.

BAB IV

PENYERAHAN ARSIP DINAMIS

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga keamanan informasi Arsip Dinamis, penyerahan Arsip dapat dilakukan dengan cara:
 - a. konvensional; atau
 - b. elektronik.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

- (2) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan cetak.
- (3) Penyerahan Arsip Dinamis dengan cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk informasi atau dokumen yang berbentuk salinan digital.

Pasal 10

Penyerahan Arsip Dinamis secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;
- b. dengan cara dimasukkan dalam amplop bersegel, untuk Arsip Terbatas; dan
- c. dengan cara:
 1. menggunakan warna kertas yang berbeda;
 2. diberi kode rahasia;
 3. menggunakan amplop ganda;
 4. amplop bersegel dan dibubuhi stempel "RAHASIA";
 5. Konfirmasi tanda terima; dan
 6. harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian Arsip/dokumen rahasia, untuk Arsip Rahasia.

Pasal 11

Penyerahan Arsip Dinamis secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan:

- a. dengan cara tanpa prosedur khusus, untuk Arsip Terbuka/Biasa;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

- b. dengan cara:
 - 1. penggunaan enkripsi;
 - 2. penggunaan alamat khusus; atau
 - 3. penggunaan sandi,untuk Arsip Terbatas yang berisi data tentang informasi personal;
- c. dengan cara:
 - 1. pengkonfirmasian dari penerima surat elektronik;
 - 2. penggunaan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia;
 - 3. penggunaan persandian atau kriptografi; dan
 - 4. pelacakan akses informasi untuk suatu surat elektronik,untuk Arsip Rahasia.

BAB V

HAK AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Arsip Dinamis dapat dipergunakan oleh pengguna yang diberikan hak akses.
- (2) Pengguna yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.

Pasal 13

Pengguna Internal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Pimpinan LPSK mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

- b. Pimpinan tingkat tinggi yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal) dan Jabatan Tinggi Pratama (Kepala Biro) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- c. Pimpinan Tingkat Menengah, yaitu jabatan Administrator (Kepala Bagian) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- d. Pelaksana kebijakan yaitu Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian) dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi Biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat Klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- e. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

Pasal 14

Pengguna Eksternal yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;
- b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 15

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan LPSK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2020

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 608

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



HASTO ATMOJO SUROYO



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TABEL KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
PK	PERUMUSAN KEBIJAKAN				
00	Kajian pengusulan perlindungan saksi dan korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
01	Penyiapan kebijakan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 16 -

					menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
02		Perumusan dan penyusunan bahan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

03		Pemberian masukan (<i>hearing</i>) dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
04		Penetapan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

					terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
PP		PENELAAHAN PERMOHONAN				
00		Sumber Informasi Penerimaan dan Penelaahan Permohonan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 19 -

00.00	Penerimaan dan penelaahan permohonan datang langsung	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
00.01	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui surat elektronik	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 20 -

					kemitraan dan reputasi .	
00.02	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui aplikasi daring	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan	
00.03	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui <i>call</i>	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Penelaahan Permohonan	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 21 -

		<i>center 148</i>			terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
	00.04	Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui layanan pro aktif	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 22 -

	00.05	Penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan darurat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
01		Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 23 -

					kemitraan dan reputasi.	
02		Investigasi dan Penilaian	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
PA		PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PUTUSAN				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 24 -

00		Penyiapan persidangan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
01		Administrasi Putusan Rapat Paripurna	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 25 -

					kemitraan dan reputasi .	
	01.00	Putusan diterima	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
	01.01	Putusan ditolak	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 26 -

					terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	
	01.02	Putusan ditolak dan diberikan rekomendasi	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 27 -

	01.03	Putusan dihentikan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Penelaahan Permohonan
	01.04	Putusan diperpanjang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Penelaahan Permohonan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 28 -

					kemitraan dan reputasi .	
	01.05	Putusan penambahan layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi .	Biro Penelaahan Permohonan
HS		PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 29 -

00		Penyiapan Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	00.00	Penelaahan Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 30 -

					kemitraan dan reputasi .	
	00.01	Laporan Hasil Penelaahan Layanan dan Risalah	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
01		Pelaksanaan Pemberian Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 31 -

					kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
01.00	Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
01.01	Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 32 -

					terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
	01.02	Tindak Pidana Terorisme	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 33 -

01.03	Tindak Pidana Perdagangan Orang	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
01.04	Narkotika dan Psikotropika	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 34 -

					kemitraan dan reputasi.	
	01.05	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	01.06	Tindak Pidana Penyiksaan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 35 -

					kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
01.07	Tindak Pidana Penganiayaan Berat	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	
01.08	Tindak Pidana Lainnya	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 36 -

					terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	
02		Laporan Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 37 -

03		Paska Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
	03.00	Paska Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 38 -

					kemitraan dan reputasi.	
	03.01	Laporan Pemantauan Paska Layanan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Dapat mengganggu fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau berdampak pada ketertiban umum. Serta dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 39 -

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KODE KLASIFIKASI		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
PR		PERENCANAAN				
00		Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	00.00	Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Master Plan (RPJP)				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 40 -

	00.01	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)				
	00.02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan				
	00.03	Rencana Strategis (Renstra)				
01		Rencana dan Program Kerja Tahunan (PKT)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 41 -

	01.00	Rencana Kerja LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.01	Usulan unit kerja beserta data pendukung	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.02	Usulan LPSK ke Instansi terkait	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.03	Program Kerja Tahunan Unit Kerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.04	Program Kerja Tahunan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 42 -

	01.05	Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.06	Rapat Pimpinan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.07	Rakor Internal LPSK	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.08	Usulan Khusus	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
02		Penetapan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 43 -

		Kontrak Kinerja		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	mengganggu fungsi dan tugas LPSK	dan Keuangan
	02.00	Penetapan Kinerja Eselon I dengan Ketua LPSK				
	02.01	Penetapan Kinerja Unit Kerja (Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama, III, dan IV)				
	02.02	Indikator Kinerja				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 44 -

03		Penyusunan Laporan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	03.00	Laporan Berkala a. Laporan harian unit kerja b. Laporan mingguan unit kerja c. Laporan bulanan unit kerja d. Laporan triwulan unit kerja e. Laporan				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 45 -

		semesteran unit kerja f. Laporan tahunan unit kerja g. Laporan Tahunan LPSK (Laptah, Laptri, Lap Monev, dll)				
	03.01	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 46 -

		(LAKIN)				
	03.02	Laporan Insidental / Khusus a. Laporan Pemantauan Prioritas b. Laporan Pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal c. Laporan Pelaksanaan kegiatan/progra	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 47 -

		m tertentu d. Laporan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI				
04	Evaluasi Program		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	04.00	Evaluasi Program Unit Kerja				
	04.01	Evaluasi Program LPSK				
	04.02	Rekomendasi Kinerja				
05	Penyusunan Anggaran					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 48 -

05.00	Kebijakan / Peraturan Penganggaran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.01	Ketetapan Pagu Indikatif / sementara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.02	Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 49 -

		lainnya) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan RUU APBN b. Risalah rapat pembahasan anggaran LPSK dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan				
--	--	--	--	--	--	--



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 50 -

		Komisi III DPR RI c. Notulen Pembahasan RUU APBN - P oleh Pemerintah dan DPR d. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN				
	05.03	Ketetapan Pagu Definitif	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	05.04	Dokumen Rencana Kerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 51 -

		Anggaran (RKA) LPSK		Administrator		
	05.05	Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 52 -

05.06	Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.07	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
05.08	Anggaran Biaya Tambahan (ABT)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 53 -

				Pengawas		
	05.09	Standar Biaya Keluaran (SBK)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
KU	KEUANGAN					
00	Pelaksanaan Anggaran					
	00.00	Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 54 -

		Pertanggungjawaban Anggaran				
01	Dokumen Realisasi Pendapatan		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	01.00	Surat Setoran Pajak (SSP)				
	01.01	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				
	01.02	Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 55 -

		atau Bukti Setor Pengembalian Belanja				
	01.03	Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank				
	01.04	Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja				
	01.05	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 56 -

02	Belanja					
	02.00	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	02.01	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	02.02	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 57 -

		Tanah dan Bangunan				
	02.03	Dokumen Pelaksanaan Pengadaaan Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	02.04	Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 58 -

		Catatan yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: a. Pengumuman lelang b. Dokumen prakuwalifikasi c. Dokumen Peninjauan Lapangan d. Berita Acara Penjelasan				
--	--	--	--	--	--	--



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 59 -

		Pekerjaan e. Berita Acara Pelelangan f. Usulan Calon Pemenang g. Penetapan Pemenang h. Surat Perintah Kerja (SPK) i. Kontrak/Addend um Kontrak j. Serah terima barang dan jasa				
--	--	---	--	--	--	--



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 60 -

	02.05	Dokumen Pembayaran Keuangan a. Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas b. Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) d. Surat Perintah Membayar (SPM)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
--	-------	---	----------	---	---	------------------------------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 61 -

		e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan (SP3)				
03	Pembukuan Anggaran		Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	03.00	Buku Kas Umum (BKU)				
	03.01	Buku Kas Pembantu (BKP)				
	03.02	Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 62 -

	03.03	Rekening Koran Bank				
	03.04	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara				
	03.05	Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK)				
	03.06	Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga				
	03.07	Daftar Rekapitulasi PNBP				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 63 -

	03.08	Izin Penggunaan Kas Besi				
04	Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur / Honorarium/Uang Makan	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
05	Kartu Gaji	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
06	Dokumen Akuntansi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan	Memiliki dampak yang dapat	Bagian Perencanaan	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 64 -

	Keuangan		Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	mengganggu fungsi dan tugas LPSK	dan Keuangan
	06.00	Berita Acara Pemeriksaan Kas			
	06.01	Kas/ Register Penutupan Kas			
	06.02	Arsip Data Komputer (ADK)			
	06.03	Laporan Pendapatan Negara			
	06.04	Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwula nan/semesteran			



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 65 -

	06.05	Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN				
07		Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
08		Laporan Keuangan Tahunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	08.00	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
	08.01	Neraca				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 66 -

	08.02	Laporan Arus Kas				
	08.03	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)				
	08.04	Laporan TEPPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)				
	08.05	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 67 -

	08.06	Monev Pelaksanaan Anggaran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
09	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)					
	09.00	Manual Implementasi dan Kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	09.01	Kebijakan Akuntansi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 68 -

	09.02	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	09.03	Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
10	Pertanggungjawaban Keuangan Negara					
	10.00	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 69 -

		Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia				
	10.01	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	10.02	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 70 -

	10.03	Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11	Bantuan/Pinjaman Luar Negeri					
	11.00	Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 71 -

		Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)				
11.01	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green book</i>)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
11.02	Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 72 -

11.03	Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Opini Hukum, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
11.04	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 73 -

		Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana				
	11.05	Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) a. <i>Reimbursement</i> b. <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i>	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 74 -

		<i>c. Special Commitment L/C Opening</i> <i>d. Special Account / Imprest Fund</i> e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah <i>f. Notice of Disbursement</i>				
	11.06	Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 75 -

	11.07	Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung Lainnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
--	-------	---	----------	---	---	------------------------------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 76 -

	11.08	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor meliputi antara lain : <i>No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of</i>	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
--	-------	---	----------	---	---	---------------------------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 77 -

		<i>Expenditure(SE)</i>)				
11.09	<i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
11.10	Report /Laporan a. <i>Progress Report</i> b. <i>Monthly Report</i> c. <i>Quarterly Report</i> d. <i>Final Report/ Completion Report</i>	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 78 -

	11.11	Laporan Hutang Negara a. Laporan pembayaran hutang negara b. Laporan posisi hutang negara	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	11.12	Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
12		Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 79 -

	12.00	Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan a. Kuasa Pengguna Anggaran, b. Kuasa Pengguna Barang / Jasa c. Pejabat Pembuat Komitmen d. Pejabat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Perencanaan dan Keuangan
--	-------	--	-------------------	--	--	---------------------------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 80 -

		Pembuat Daftar Gaji e. Pejabat Penandatanganan SPM f. Bendahara Penerimaan / Pengeluaran g. Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan.				
13	Verifikasi Anggaran a. Nota Hasil Verifikasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Perencanaan dan Keuangan	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 81 -

	NHV) b. Jawaban Nota Hasil Verifikasi (JNHV)		Tinggi Pratama	LPSK		
RT	KERUMAHTANGGAAN					
00	Pengadaan					
	00.00	Analisa Kebutuhan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.01	Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemili	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 82 -

		han Langsung/Lelan g)				
	00.02	Daftar Rekanan Mampu	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.03	Serah Terima Barang	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
01	Pendistribusian		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
02	Telekomunikasi		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 83 -

03	Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04	Pengurusan Kendaraan Dinas 1. Pengurusan surat - surat kendaraan dinas 2. Pemeliharaan dan perbaikan 3. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
05	Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 84 -

06	Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
07	Penghematan Energi		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08	Ketertiban dan Keamanan					
	08.00	Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 85 -

	08.01	Laporan Ketertiban dan Keamanan yang terdiri atas kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
09	Administrasi Pengelolaan Parkir		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
10	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 86 -

11	Pengadaan Outsourcing	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
12	Ijin Peminjaman Sarana dan Prasarana	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
13	Sumbangan dan Bantuan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
BM	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)				
00	Simak BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 87 -

01	Pembukuan BMN 1. Daftar barang kuasa/pengguna 2. Kartu Identitas Barang (KIB)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
03	Inventarisasi BMN 1. Keputusan Pembentukan Tim 2. Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi 3. Kertas kerja Inventarisasi 4. Berita acara inventarisasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 88 -

	5. Daftar inventaris/buku barang/daftar barang 6. Laporan hasil inventarisasi				
04	Laporan BMN 1. Laporan kondisi barang 2. Laporan barang kuasa pengguna 3. Berita acara rekonsiliasi eksternal dan internal 4. Laporan persediaan habis pakai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 89 -

	5. Laporan persediaan tidak habis pakai 6. Laporan pengelolaan Barang Milik Negara				
05	Rumah Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
06	Tanah	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
07	Penggunaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
08	Pemanfaatan BMN				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 90 -

	08.00	Sewa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.01	Pinjam Pakai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.02	Kerjasama pemanfaatan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.03	Bangun guna serah / Bangun serah guna	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	08.04	Kerjasama penyediaan infrastruktur	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 91 -

09	Pemindahtanganan BMN		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
10	Pengamanan dan Pemeliharaan BMN					
	10.00	Pemeliharaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	10.01	Laporan Pengamanan dan/atau pemeliharaan BMN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
11	Pengawasan dan pengendalian BMN					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 92 -

	11.00	Pemantauan dan penertiban BMN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	11.01	Laporan pengawasan dan pengendalian BMN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12		Penghapusan dan Pemusnahan BMN 1. Keputusan pembentukan tim 2. Berita acara penghapusan BMN 3. Daftar barang yang dihapus	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 93 -

	4. Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMN termasuk didalamnya proses lelang				
TI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
00	Rencana Strategis /Master Plan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 94 -

01	Dokumen Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
02	Dokumentasi Implementasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
03	Perekaman dan Pemutakhiran Data 1. Formulir isian 2. Daftar Petugas Perekaman 3. Jadwal Pelaksanaan 4. Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 95 -

04	Migrasi Sistem Aplikasi dan Data 1. Perencanaan migrasi 2. Pelaksanaan migrasi 3. Berita acara kegiatan migrasi 4. Daftar sistem aplikasi dan data yang di migrasi 5. Laporan hasil migrasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
05	Dokumen hosting 1. Formulir permintaan barang 2. Laporan hasil uji kelayakan 3. Laporan pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 96 -

	hosting					
06	Pengamanan Jaringan dan Layanan back up data digital	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
07	Lisensi Perangkat TIK dan Sistem Informasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	
08	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)					
	08.00	Administrasi LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 97 -

08.01	Aplikasi LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.02	Verifikasi Penyedia	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.03	Akun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.04	Pelatihan SPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
08.05	Standar LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 98 -

	08.06	Laporan LPSE	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
BJ	PENGADAAN BARANG DAN JASA					
00	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	00.00	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.01	Rencana dan Analisis Kebutuhan Barang	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 99 -

01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	01.00	Lelang umum / Lelang terbatas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	01.01	Swakelola / Pengadaan Langsung/ e - Purchasing/ e - catalogue	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	01.02	Penunjukan Langsung	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	01.03	Telaah pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 100 -

		lelang/pemilikan /penunjukan langsung		Pengawas		
	01.04	Dokumen lelang 1. Barang inventaris kantor/barang bergerak (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 101 -

		barang) 2. Barang invetasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang)				
02	Monev Pengadaan Barang dan Jasa		Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
PW	PENGAWASAN					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 102 -

00	Rencana Pengawasan					
	00.00	Rencana Strategi Pengawasan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	00.01	Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	00.02	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	00.03	Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	00.04	Rakor Pengawasan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Unit Pengawasan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 103 -

		Tingkat Nasional		Administrator	LPSK	
01	Pelaksanaan Pengawasan					
	01.00	Laporan yang memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.01	Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.02	Laporan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 104 -

01.03	Laporan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.04	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.05	Laporan LHKPN dan LHKASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
01.06	Laporan Perkembangan Barang Milik	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 105 -

		Negara				
	01.07	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran LPSK	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.08	Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.09	Laporan Hasil Evaluasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Unit Pengawasan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 106 -

				Administrator	LPSK	
	01.10	Pemantauan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.11	Pembangunan Pakta Integritas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan
	01.12	Manajemen Risiko	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Unit Pengawasan
	01.13	Sistem Pengawasan Internal Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 107 -

		(SPIP)				
	01.14	Pengawasan bidang keArsipan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Unit Pengawasan
HK	HUKUM					
00	Program Legislasi					
	00.00	Bahan/materi program legislasi nasional dari LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	00.01	Program legislasi LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 108 -

01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan					
	01.00	Berkas rancangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan Saksi dan Korban	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 109 -

01.01	Berkas rancangan proses penyusunan produk hukum LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01.02	Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang bersifat nasional/ regional/instansional	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 110 -

		termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir				
	01.03	Surat Perintah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
02		Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 111 -

03	Dokumentasi Hukum a. Eksternal Undang-undang, Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan Peraturan - peraturan yang dijadikan referensi b. Internal Produk peraturan perundangan LPSK yang dijadikan referensi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
04	Soislisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 112 -

	(Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)					
04.00	Bahan Materi kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/pembinaan hukum	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum	
04.01	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi / Penyuluhan/ Pembinaan Hukum	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 113 -

05	Bantuan/ konsultasi hukum/advokasi		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
06	Kasus / Sengketa Hukum					
	06.00	Pidana	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Biro Administrasi
	06.01	Perdata	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Biro Administrasi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 114 -

	06.02	Tata Usaha Negara	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Biro Administrasi
	06.03	Arbitrase	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Biro Administrasi
07	Telaah Hukum					
	07.00	Telaah Hukum Regulasi Internal LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	07.01	Telaah Hukum Eksternal yang berkaitan dengan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08	Perizinan					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 115 -

	08.00	Pemberian/ Persetujuan/ Kewenangan/ Rekomendasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	08.01	Penolakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	08.02	Peringatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	08.03	Pencabutan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	08.04	Perpanjangan Izin	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 116 -

				Pengawas		
	08.05	Dispensasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
09	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)					
	09.00	Hak Cipta	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 117 -

	09.01	Hak Paten Biasa dan Sederhana	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi
	09.02	Hak Merek	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Tinggi Pratama	Memiliki dampak yang serius terhadap privasi, dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Biro Administrasi
10	Surat Kuasa					
	10.00	Surat Kuasa Khusus	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 118 -

				Administrator	LPSK	
	10.01	Surat Kuasa dengan Hak Substitusi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	10.02	Surat Kuasa Lainnya	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
OT	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
00	Struktur Organisasi LPSK					
	00.00	Pembentukan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 119 -

				Pengawas		
	00.01	Perubahan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	00.02	Pembubaran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01	Organisasi					
	01.00	Standar Kompetensi Jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.01	Evaluasi Kelembagaan/Or ganisasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat menggangu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 120 -

	01.02	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
02	Tata Laksana		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03	Reformasi Birokrasi					
	03.00	Implementasi Reformasi Birokrasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 121 -

	03.01	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
KS	KERJASAMA					
00	Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
01	Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 122 -

	01.00	Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
02	Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman Kerja					
	01.00	Dalam Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	01.01	Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 123 -

				Pengawas	LPSK	
03	Penguatan dan Evaluasi Jaringan Kerjasama		Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
HM	INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT					
00	Keprotokolan					
	00.00	Penyelenggaraan Acara Kedinasan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 124 -

				Pengawas		
	00.01	Buku Tamu	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	00.02	Agenda Kegiatan Pimpinan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	00.03	Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
	00.04	Kunjungan Dinas Eksternal	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 125 -

	00.05	Daftar nama / alamat kantor / Pejabat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
01		Dokumentasi / Peliputan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
02		Pengumpulan, pengelolaan, dan Penyajian Informasi				
	02.01	Kliping Koran	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	02.02	Brosur/leaflet/p oster/plakat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 126 -

	02.03	Pengumuman/pemberitaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03	Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi					
	03.00	Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 127 -

03.01	Hubungan dengan Organisasi Sosial (LSM)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03.02	Hubungan dengan perusahaan atau pihak swasta	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03.03	Hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
03.04	Forum Kehumasan (Bakohumas /	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 128 -

		Perhumas)				
	03.05	Hubungan dengan media massa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
04		Bahan Materi Sidang atau Musyawarah Nasional	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Hukum
05		Penerbitan Cetakan (majalah, buletin, koran dan jurnal)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
06		Publikasi melalui media cetak, elektronik dan online	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 129 -

07	Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
08	Pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
10	Pemberian Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
11	Pidato atau Sambutan Pimpinan				
	11.00 Sambutan Pimpinan LPSK	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 130 -

				Pengawas		
	11.01	Sambutan Eselon I dan II	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
12	Pelayanan PPID					
	12.00	Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	12.01	Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	12.02	Pemberitahuan Tertulis	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Hukum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 131 -

		Permintaan Informasi masih dalam proses		Pengawas		
	12.03	Tanda Bukti Penyerahan Permintaan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
	12.04	Pernyataan Keberatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Hukum
AR	KEARSIPAN					
00	Administrasi Persuratan					
	00.00	Kartu Kendali	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 132 -

				Pengawas		
	00.01	Buku Agenda	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	00.02	Lembar Pengantar / buku Ekspedisi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	00.03	Formulir / catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen / Arsip	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01	Penyimpanan dan					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 133 -

	Pemeliharaan Arsip					
	01.00	Daftar Arsip diantaranya Arsip Dinamis, Arsip informasi publik dan Arsip vital	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.01	Daftar Pencarian Arsip	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.02	Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 134 -

			Pengawas		
03	Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
04	Penyusutan Arsip				
	04.00 Pemindahan Arsip Inaktif a. Berita acara pemindahan b. Daftar Arsip yang dipindahkan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 135 -

	04.01	Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna a. Berita acara pemusnahan b. Daftar Arsip yang dimusnahkan c. Rekomendasi/ pertimbangan/persetujuan pemusnahan Arsip dari Unit Kerja Terkait dan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
--	-------	--	----------	---	---	--------------------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 136 -

		ANRI d. Surat keputusan pemusnahan				
	04.02	Penyerahan Arsip Statis a. Berita acara serah terima Arsip b. Daftar Arsip yang diserahkan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
05	Berkas Proses Alih Media Arsip		Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
06	Pembinaan Kearsipan					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 137 -

	06.00	Apresiasi, Sosialisasi dan Penyuluhan KeArsipan/Loka karya/Workshop	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	06.01	Bimbingan teknis keArsipan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	06.02	Supervisi, evaluasi dan monitoring	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
07		Akreditasi Kearsipan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 138 -

08	Audit Kearsipan (internal dan eksternal)		Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian TU dan Persuratan
PT	KEPUSTAKAAN					
00	Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka					
	00.00	Bukti Penerimaan koleksi deposit bahan pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	00.01	Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 139 -

01	Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka					
	01.00	Buku Induk Koleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.01	Daftar Buku Terseleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 140 -

01.02	Daftar Buku dalam pemesanan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.03	Daftar Buku dalam Permintaan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.04	Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
01.05	Daftar Penerimaan bahan pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 141 -

		surplus				
	01.06	Lembar kerja pengolahan BP (buram pengkatalogan)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.07	ShelfList dan Master List	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.08	Daftar tambahan koleksi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	01.09	Daftar jajaran kendali	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 142 -

02	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi					
	02.00	Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	02.01	Pertanyaan, rujukan, dan jawaban	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
03	Preservasi Bahan Pustaka					
	03.00	Survei Kondisi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 143 -

				Pengawas		
	03.01	Repografi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
	03.02	Fumigasi Bahan Pustaka	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian TU dan Persuratan
KP	KEPEGAWAIAN					
00	Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian					
	00.00	Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 144 -

		Naskah Akademik				
	00.01	Penyusunan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.02	Perumusan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.03	Pemberian masukan dan dukungan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	00.04	Penetapan kebijakan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 145 -

	00.05	<i>Memorandum of Understanding</i> bidang kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara					Bagian Umum
	01.00	Perencanaan Kebutuhan ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	01.01	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	01.02	Penetapan Kebutuhan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 146 -

		Aparatur Sipil Negara		Pengawas		
	01.03	Standarisasi Jabatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum
02	Formasi dan Pengadaan Pegawai					
	03.00	Formasi ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 147 -

	03.01	Pengadaan ASN 1. Proses penerimaan pegawai 2. Penetapan pengumuman kelulusan 3. Berkas lamaran yang tidak diterima 4. Nota usul dan kelengkapan NIP e. Nota usul pengangkatan CPNS menjadi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
--	-------	---	-------------------	---	---	-------------



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 148 -

		PNS lebih 2 tahun f. Surat keputusan CPNS / PNS Kolektif				
	03.02	Sistem Rekrutmen ASN	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
03	Mutasi Pegawai					
	03.00	Usulan Mutasi Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.01	Persetujuan/Pertimbangan Kepala	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 149 -

		BKN		Pengawas		
	03.02	Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.03	Mutasi Keluarga 1. Surat izin pernikahan/perceraian 2. Surat penolakan izin 3. Akta nikah/cerai 4. Akta kelahiran	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 150 -

		anak 5. Surat keterangan meninggal dunia				
	03.04	Usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.05	Usul pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 151 -

	03.06	Usul penetapan perubahan data dasar/status/keudukan hukum pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.07	Usulan Peninjauan Masa Kerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	03.08	Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
04	Pengembangan Karir					
	04.00	Usulan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 152 -

		Karir		Pengawas		
	04.01	Surat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPL) / Sertifikat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	04.02	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	04.03	Pakta Integritas Pegawai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	04.04	Laporan hasil kekayaan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 153 -

		penyelenggara negara (LHKPN)		Administrator	LPSK	
	04.05	Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	04.06	Disiplin pegawai 1. Daftar hadir 2. Rekapitulasi daftar hadir	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	04.07	Berkas Hukuman Disiplin	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	04.08	Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 154 -

05	Kinerja					
	05.00	Hasil Penilaian kinerja dan standar kerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	05.01	Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	05.02	Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kinerja	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 155 -

06	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN					
	06.00	Kode etik pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	06.01	Disiplin Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	06.02	Pemberhentian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 156 -

				Administrator	LPSK	
	06.03	Pensiun	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
07	Bantuan Hukum					
	07.00	Pemberian Bantuan Hukum	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	07.01	Bantuan Hukum Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
08	Status dan Kedudukan Pegawai					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 157 -

	08.00	Pertimbangan Status Kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	08.01	Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	08.02	Penyelesaian pengelolaan keberatan kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	08.03	Perselisihan / sengketa kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
09	Sistem Informasi Kepegawaian					



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 158 -

	09.00	Pengolahan data dan informasi kepegawaian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	09.01	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
10	Pengawasan dan Pengendalian					
	10.00	Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	10.01	Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 159 -

		dalam jabatan				
	10.02	Gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	10.03	Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	10.04	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	10.05	Berkas sanggahan terhadap	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 160 -

		Permasalahan tenaga Honorer				
11	Administrasi Pegawai					
	11.00	Surat Perintah Dinas / Surat Tugas	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	11.01	Cuti Sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	11.02	Cuti Alasan Penting	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	11.03	Cuti besar dan cuti diluar tanggungan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 161 -

		Negara				
	11.04	Dokumentasi identitas pegawai 1. Usul penetapan kartu 2. Keanggotaan organisasi 3. Laporan pajak Penghasilan Pribadi (LP2P / SPT Tahunan /NPWP 4. Keterangan penerimaan	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 162 -

		pembayaran penghasilan pegawai (KP4)				
11.05	Berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK)	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum	
11.06	Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum	



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 163 -

	11.07	Berkas Kehadiran Pegawai	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	11.08	Berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	11.09	Penghargaan pegawai	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
12	Kesejahteraan Pegawai					
	12.00	Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 164 -

		Pegawai				
	12.01	Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.02	Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.03	Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.04	Berkas tentang Layanan Pakaian	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 165 -

		Dinas		Pengawas		
	12.05	Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal Karena Dinas	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	12.06	Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.07	Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 166 -

	12.08	Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	12.09	Berkas tentang Medical Record	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
13	Administrasi Perseorangan					
	13.00	Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 167 -

13.01	Berkas Perseorangan PPPK	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
13.02	Berkas Perseorangan Anggota LPSK	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 168 -

	13.03	Berkas Perseorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Rahasia	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privasi</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
14	Penilaian Kompetensi					
	14.00	Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum
	14.01	Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Administrator	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi dan tugas LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 169 -

15	Pendelegasian wewenang					
	15.00	Pelaksana Tugas (Plt.)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	15.01	Pelaksana Harian (Plh.)	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
16	Perkumpulan Pegawai dan Non Pegawai					
	16.00	KORPRI	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 170 -

				Pengawas		
	16.01	Dharma Wanita	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
	16.02	Koperasi	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 171 -

	16.03	Lainnya	Biasa/ Terbuka	Dapat diakses oleh Pimpinan Tingkat Tertinggi hingga Pejabat Pengawas	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja LPSK	Bagian Umum
--	-------	---------	-------------------	---	---	-------------

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HASTO ATMOJO SUROYO

Salinan ini sesuai dengan aslinya



KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

HASTO ATMOJO SUROYO